

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika output barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perubahan nilai PDB dapat menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB, dalam suatu negara juga dikenal ukuran PNB (Produk Nasional Bruto) serta Pendapatan Nasional (National Income) (Sukirno, 2008)

Todaro (2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Sementara itu, Jhingan (2012:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Sukirno (2004:50), menjelaskan “pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi biasanya dihitung berdasarkan pertambahan yang sebenarnya dari barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi suatu perekonomian”.

$$g = \frac{PN\text{-riil}_1 - PN\text{-riil}_0}{PN\text{-riil}_0} \times 100\%$$

Dimana; g : pertumbuhan ekonomi

PN riil₁ : pendapatan nasional tahun dihitung

PN-riil₀ : pendapatan nasional tahun sebelumnya

Terdapat satuan ukur sebagai dasar dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Menurut Sukirno (2006:35), PDB merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki warga negara maupun warga negara asing dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan indikator pertumbuhan PDB riil. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini, terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu dari sisi output totalnya (PDB) dan sisi jumlah penduduknya. Proses kenaikan output per kapita harus dianalisis dengan melihat apa yang terjadi dengan output total dan jumlah penduduk. Aspek lain dari definisi “pertumbuhan ekonomi” adalah perspektif waktu. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama mengalami kenaikan output per kapita. Pada suatu saat memang bisa terjadi penurunan output, tetapi apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output per kapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat, maka dapat dikatakan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan penyediaan dan pengalokasian faktor-faktor produksi secara efisien. Modal sebagai salah faktor produksi untuk pembiayaan pembangunan nasional pada dasarnya berasal dari dua sumber yaitu sumber modal dalam negeri dan sumber modal luar negeri. Sumber modal dalam negeri berupa tabungan yang diciptakan dan dihimpun dengan cara menghemat konsumsi sekarang atau meningkatkan penerimaan baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Sedangkan sumber modal dari luar negeri berupa hibah (*grant*), utang luar negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Pembentukan modal membawa kepada pemanfaatan penuh sumber-sumber yang ada sehingga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Laju

pembentukan modal yang cepat akan dapat mengurangi kebutuhan terhadap modal asing. Pembentukan modal pada kenyataannya membantu tercapainya swasembada suatu negara dan mengurangi beban utang luar negeri. Dengan demikian, kenaikan laju pembentukan modal meningkatkan tingkat pendapatan nasional. Proses pembentukan modal tersebut membantu menaikkan output, yang pada akhirnya menaikkan laju dan tingkat pendapatan nasional.

2.1.1.1. Teori serta Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi serta bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Terdapat banyak teori pertumbuhan ekonomi tetapi hanya dua yang dimasukkan dalam penelitian ini dikarenakan cukup untuk menerangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yaitu teori Harrod-Domar dan teori Keynes.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian (Mankiw, 2010). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa pada periode tertentu. PDB ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB suatu negara maka dapat dikatakan bahwa semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut. Sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap PDB. Namun menurut teori Keynes, PDB terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, keempat faktor tersebut adalah konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto (NX). Keempat faktor tersebut kembali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, tingkat harga, suku bunga, tingkat inflasi, money supply, nilai tukar, dan sebagainya.

Beberapa ekonom berpendapat bahwa kecenderungan yang terus meningkat terhadap output perkapita saja tidak cukup, tetapi kenaikan output harus bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Dengan kata lain

pertumbuhan ekonomi harus bersifat “*self generating*”, yang mengandung arti menghasilkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang (periode-periode selanjutnya).

2.1.2. Utang Luar Negeri (ULN)

Utang luar negeri dapat dilihat sebagai sumber pendapatan. Yustika (2009:122), menjelaskan bahwa efektifitas pemanfaatan ULN diperuntukkan dalam menangani kesenjangan tabungan atau investasi dan ketimpangan neraca pembayaran untuk membantu negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan yang mandiri. Kondisi perekonomian di negara berkembang yang belum stabil memaksa pemerintah untuk melakukan ULN sebagai salah satu sumber pendanaan. Melihat dari sisi neraca pembayaran, ULN dapat menutup kesenjangan ekspor dan impor sehingga mampu mengurangi penggunaan stok nasional (Boediono, 2001:84).

Penurunan stok nasional memberikan indikasi defisit sehingga pemerintah melakukan kebijakan ULN sebagai pengganti stok nasional dalam menanggulangi kesenjangan impor dalam neraca pembayaran. Kekurangan sumber daya berupa devisa atau tabungan domestik, salah satunya bisa didapat dari pinjaman luar negeri atau utang luar negeri. Pendekatan inilah yang disebut sebagai analisis bantuan luar negeri dua kesenjangan (*two-gap model*) ini mengatakan bahwa negara berkembang pada umumnya menghadapi kendala keterbatasan tabungan domestik yang jauh dari mencukupi untuk menggarap segenap peluang yang investasi yang ada, serta kelangkaan devisa yang tidak memungkinkan mengimpor barang-barang modal dan antara yang penting bagi usaha pembangunannya. Secara umum model ini berasumsi bahwa kekurangan dan kesenjangan (antara persediaan dan kebutuhan) tabungan (*saving gap*) serta kesenjangan devisa (*foreign-exchange gap*) itu tidak sama bobotnya, dan satu sama lain berdiri sendiri. Kekurangan tabungan tidaklah dapat digantikan oleh cadangan devisa begitu juga sebaliknya, kekurangan devisa tidak pula dapat dipenuhi oleh tabungan dalam negeri (Sukirno, 2006).

Model dua kesenjangan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1). Kesenjangan Tabungan Dimulai dengan suatu persamaan atau identitas atas hubungan antara pemasukan modal (misalnya, selisih antara ekspor-impor) dan dengan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk investasi, dengan tingkat investasi, dengan tingkat investasi domestik, yang dapat di tulis sebagai berikut :

$$I < F + S_y$$

Dimana F adalah jumlah arus pemasukan modal. Seandainya nilai F ditambah sY lebih besar dari I, dan perekonomian itu tengah berada dalam kondisi *full employment*, maka bisa dipastikan bahwa terjadi kesenjangan di tabungan negara tersebut.

- 2). Kesenjangan Devisa Jika setiap unit investasi yang dilakukan oleh negara – negara berkembang menyebabkan kenaikan impor sebesar m_1 , yakni pangsa impor marjinal (*marginal impor share*) di kebanyakan negara berkembang, pangasanya ini berkisar dari 30 sampai 60 persen dan kecenderungan marjinal terhadap impor (*marginal propensity to impor*) akibat naiknya 1 unit PDB dengan parameter m_2 , maka kesenjangan devisa itu dirumuskan sebagai berikut :

$$(m_1 - m_2) I + m_2 Y - E < F$$

Simbol E melambangkan tingkat ekspor eksogen. Faktor F dalam kedua ketidaksamaan diatas merupakan faktor krisis dalam analisis. Jika F, E dan Y diberikan nilai secara eksogen (ditentukan dari luar), maka salah satu dari ketidaksamaan diatas menjadi faktor penghambat investasi akan tertekan menjadi lebih rendah oleh salah satu ketidaksamaan tersebut. Dengan demikian penerapan rumus tersebut setiap negara akan dapat diketahui masalah utamanya, apakah kesenjangan tabungan atau kesenjangan devisa.

2.1.2.1. Peranan Utang Luar Negeri dan Alasan Dilakukannya Utang Luar Negeri

Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang, bantuan luar negeri terutama dianalisa dan ditinjau dari sudut

pandang manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi negara berkembang untuk mencapai tujuannya. Ditinjau dari sudut ini, terdapat dua peranan utama dari bantuan luar negeri, yaitu mengatasi masalah kekurangan tabungan (*saving gap*), dan mengatasi masalah kekurangan mata uang asing (*foreign exchange gap*). Yang mana kedua masalah yang diharapkan dapat diatasi dengan melakukan pengajuan utang luar negeri itu disebut dengan masalah jurang ganda (*the two gaps problem*). Kegiatan untuk memberikan bantuan luar negeri oleh negara-negara maju kepada negara-negara yang sedang berkembang dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain yaitu membantu negara-negara yang menerima bantuan untuk mempercepat pembangunan ekonominya, membantu mengeratkan hubungan ekonomi dan politik di antara negara yang menerima dan memberi bantuan, membendung pengaruh ideologi yang bertentangan dengan yang dianut oleh negara pemberi bantuan (Sukirno, 2008).

Utang luar negeri bukan hanya dibutuhkan dalam proses perdagangan, tetapi juga dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara untuk menunjang proses produksi dalam negeri. Artinya, utang luar negeri merupakan mata rantai yang menghubungkan kegiatan internal dan eksternal perekonomian suatu negara. Dalam pemahaman ini sulit sekali menyatakan bahwa suatu negara bisa saja tidak berutang sama sekali. Tetapi jelas sekali bahwa jumlah dan pemanfaatan utang tersebut harus dikendalikan dan dikelola secara benar sehingga justru tidak menjadi beban yang berkepanjangan. Kegiatan untuk memberikan bantuan luar negeri oleh negara-negara maju kepada negara-negara yang sedang berkembang dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain yaitu:

- a) Membantu negara-negara yang menerima bantuan untuk mempercepat pembangunan ekonominya.
- b) Membantu mengeratkan hubungan ekonomi dan politik diantara Negara yang menerima dan memberi bantuan.
- c) Membendung pengaruh ideologi yang bertentangan dengan yang dianut oleh Negara pemberi bantuan.

2.1.2.2. Pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sumber pembiayaan pembangunan nasional dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Selain mengandalkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri, Indonesia juga mengandalkan pembiayaan pembangunan yang berasal dari luar negeri. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan sumber pembiayaan dari dalam negeri, yaitu tabungan domestik dalam pendanaan bagi pembangunan sepenuhnya. Tabungan domestik dibutuhkan untuk membiayai investasi. Besarnya tabungan yang tidak seimbang dengan rencana kegiatan investasi (*saving investment gap*) menyebabkan kegiatan pelaksanaan investasi tidak berjalan sesuai rencana. Kesenjangan antara tabungan dan investasi tersebut selanjutnya dapat ditutup dengan masuknya dana dari luar negeri. Salah satu alternatif pembiayaan tersebut adalah melalui utang luar negeri. Di samping itu, utang luar negeri juga berperan dalam mengatasi kesenjangan ekspor-impor sehingga utang luar negeri memberikan tambahan devisa yang diperlukan negara dikarenakan hasil ekspor yang tidak mencukupi untuk menambah modal untuk pembangunan nasional (Sukirno, 2006). Dengan adanya utang luar negeri sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, maka diharapkan dapat menambah jumlah tabungan domestik dan mampu memacu investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pada berbagai kajian empiris menunjukkan pula hubungan antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi umumnya berkorelasi negatif, meskipun terdapat sejumlah kajian yang menolaknya. Namun karena utang luar negeri masih merupakan bagian dari investasi sehingga berdampak positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, tujuan dasar dari utang luar negeri bukan pada substansinya, tetapi pada persoalan pada alokasi dan pemanfaatannya apakah secara proporsional atau tidak.

2.1.3. Penanaman Modal Asing (PMA)

Arus sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Hal pertama adalah penanaman modal asing “langsung” atau PMA, yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional atau biasa juga

disebut perusahaan transnasional, yaitu suatu perusahaan besar yang berkantor pusat berada di negara-negara maju asalnya, sedangkan cabang operasi atau anak-anak perusahaannya tersebar diberbagai penjuru dunia. Dana investasi ini langsung diwujudkan dengan berupa pendirian pabrik, pengadaan fasilitas produksi, pembelian mesin-mesin dan sebagainya. Investasi asing swasta ini juga berupa investasi portfolio (*portofolio investment*) yang dana investasinya tidak diwujudkan langsung sebagai alat-alat produksi, melainkan ditanam pada aneka instrumen keuangan seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, dan sebagainya (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan penanaman modal asing secara langsung yakni yang dana-dana investasinya langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau pengadaan alat-alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku dan sebagainya, (untuk membedakan dengan investasi portfolio) berlangsung dengan cepat khususnya masa sebelum krisis ekonomi. Pada kenyataannya, dana investasi asing akan selalu tertuju ke negara-negara atau kawasan yang menjanjikan tingkat hasil finansial dan kadar kepastian yang tinggi.

Pada dasarnya, investasi (penanaman modal) secara langsung ini jauh lebih kompleks dari sekedar transfer modal ataupun pendirian bangunan pabrik dari suatu perusahaan asing di wilayah suatu negara berkembang. Perusahaan-perusahaan raksasa tersebut juga membawa teknik atau teknologi produksi yang lebih canggih, selera dan gaya hidup, jasa-jasa manajerial, serta berbagai praktek bisnis termasuk pemberlakuan dan pengaturan perjanjian kerjasama dan sebagainya (Sukirno, 2006).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi investasi pada suatu negara. Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi PMA adalah makroekonomi. Dengan tujuan untuk meminimalisirkan resiko investasi para investor harus memperhatikan faktor makroekonomi suatu negara, cara mengambil keputusan yang tepat, dan menentukan bentuk PMA apa yang sesuai untuk dilakukan di suatu negara (Sukirno, 2006:123).

Modal asing dapat memasuki suatu negara dalam bentuk modal swasta dan/atau modal negara. Modal asing swasta dapat mengambil bentuk penanaman modal asing langsung dan penanaman modal asing tidak langsung. Berikut penjelasannya (Jhingan, 2012):

1) Penanaman Modal Asing Langsung

Penanaman Modal Asing Langsung merupakan perusahaan dari negara penanam modal secara *de facto* atau *de jure* melakukan pengawasan atas aset (aktiva) yang ditanam di negara pengimpor modal dengan cara investasi itu. Penanaman modal asing langsung dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu: pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal; pembentukan suatu perusahaan dalam mana perusahaan dari negara penanaman modal memiliki mayoritas saham; pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang terletak di negara penanam modal mendirikan suatu korporasi di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal.

2) Penanaman Modal Asing Tidak Langsung

Lebih dikenal sebagai investasi *portfolio* atau *rentier* yang sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan (yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah negara pengimpor modal), atas saham atau surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Penguasaan saham tersebut tidaklah sama dengan hak untuk mengendalikan perusahaan. Para pemegang saham hanya mempunyai hak atas deviden saja. Pada tahun-tahun terakhir ini telah berkembang investasi tidak langsung secara multilateral. Warga Negara dari suatu negara membeli membeli surat-surat obligasi *Internastional Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) yang dilambangkan atau yang membiayai suatu proyek khusus di beberapa negara terbelakang.

2.1.3.1 Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dunia usaha mengadakan investasi didorong oleh pertimbangan ekspektasi keuntungan jangka panjang yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi,

pertumbuhan penduduk serta faktor-faktor lain. Investasi bervariasi secara langsung dengan pendapatan, hal ini karena investasi berhubungan dengan keuntungan, dan sebagian besar investasi dibiayai secara internal dari keuntungan perusahaan. Bila pendapatan naik, keuntungan juga naik dan demikian pula tingkat investasi. Bila tingkat pendapatan atau output rendah, ini berarti dunia usaha mempunyai cukup banyak kelebihan kapasitas produksi hingga tak ada dorongan membeli barang-barang modal baru.

Pengaruh investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan arti penting bagi negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Sampai saat ini konsep pembangunan dengan menggunakan modal asing masih sering menimbulkan berbagai pendapat. *Foreign direct investment* (FDI) dipandang sebagai cara yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dengan melalui FDI, modal asing dapat memberikan kontribusi yang lebih baik ke dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, beberapa negara berkembang di Asia Tenggara, berusaha memberikan insentif kepada masuknya modal asing dalam bentuk FDI ini. Di sisi lain, negara pengekspor modal juga memberikan insentif kepada sektor swasta berupa insentif pajak, jaminan dan asuransi atas investasi untuk mendorong FDI ke negara berkembang. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Pengaruh dari peran ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian. Pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan seperti ini akan selalu diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja. Kedua, penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kepastian memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja. Ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan akan memberikan sumbangan penting ke atas kenaikan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat (Sukirno, 2000). Jadi sudah sangat jelas bahwa penanaman

modal asing mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat memungkinkan dapat mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.4. Ketahanan Pangan

2.1.4.1. Pengertian Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012).

Di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:

1. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

2. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.

3. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.

4. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Janin dalam kandungan, bayi, balita, anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut membutuhkan makanan yang sesuai dengan syarat gizi untuk mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mencapai prestasi kerja. Ada beberapa hal penting dalam mengatasi permasalahan pangan di Indonesia (Purwaningsih, 2008:3) yaitu :

1) Ketersediaan pangan

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan dalam negeri harus diupayakan melalui produksi dalam negeri dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk.

2) Kemandirian pangan

Kemandirian pangan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya) pada negara lain.

3) Keterjangkauan pangan

Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan.

4) Konsumsi pangan

Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat.

2.1.4.2. Pendekatan Ketahanan Pangan

Definisi mengenai ketahanan pangan (*food security*) memiliki perbedaan dalam tiap konteks waktu dan tempat. Istilah ketahanan pangan sebagai sebuah kebijakan ini pertama kali dikenal pada saat *World Food Summit* tahun 1974 . Setelah itu, ada banyak sekali perkembangan definisi konseptual maupun teoritis dari ketahanan pangan dan hal-hal yang terkait dengan ketahanan pangan. Secara formal, ada lima organisasi internasional yang memberikan definisi mengenai ketahanan pangan. Definisi tersebut dianggap saling melengkapi satu sama lain, diantaranya:

- a. *First World Food Conference* 1974, United Nations, 1975 “Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan, dan menyeimbangkan fluktuasi produksi dan harga.”
- b. FAO (*Food and Agricultural Organization*), 1992 “Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif.”
- c. Bank Dunia (*World Bank*), 1996 “Ketahanan pangan adalah akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif”.
- d. OXFAM, 2001 “Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang sehat dan aktif. Ada dua kandungan makna yang tercantum disini, yakni ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas, dan akses dalam artian hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran, maupun klaim.”
- e. FIVIMS (*Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems*), 2005 “Ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi, memiliki akses atas pangan yang cukup, aman, dan bergizi, untuk pemenuhan kebutuhan

konsumsi (*dietary needs*) dan pilihan pangan (*food preferences*) demi kehidupan yang aktif dan sehat.”

Berdasarkan definisi ketahanan pangan diatas jelas terlihat bahwa setiap lembaga memberikan pengertian yang berbeda dan berubah-ubah menurut waktu, pada tingkat global, Nasional sampai kepada skala rumah tangga dan individu. Namun, dalam penjabarannya terdapat berbagai variasi dikarenakan konsep ketahanan pangan sangat luas dan kompleks menyangkut berbagai hal.

Adanya ketahanan pangan maka diharapkan Masyarakat dapat mewujudkan kemandirian pangan, dimana arti kemandirian pangan itu sendiri Menurut UU RI No. 18 Tahun 2012 adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Strategi yang diterapkan dalam rangka keberhasilan pembangunan ketahanan pangan (Hanafie, 2010) adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat.
- 2) Pengembangan sistem dan usaha agrobisnis.
- 3) Mewujudkan kebersamaan antara masyarakat sebagai pelakudan pemerintah sebagai fasilitator.
- 4) Menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, mengelola produksi pangan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, dan mampu menyalurkan kelebihan produksi pangan untuk memperoleh harga yang wajar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penganeragaman pangan dengan mutu pangan yang dikonsumsi harus semakin meningkat dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.
- 5) Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi pihak-pihak terkait dalam perencanaan, kebijakan, pembinaan, dan pengendalian.

Pada intinya suatu negara (pemerintah dan masyarakat) bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya baik akibat adanya kondisi pangan yang sulit diperoleh penduduk maupun akibat rendahnya daya beli masyarakat (baik karena pendapatan rendah atau kebijakan harga-harga pangan). Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996). Tersedianya pangan yang cukup merupakan syarat terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi penduduk yang jumlahnya terus bertambah.

Ada empat aspek guna mencapai ketahanan pangan, yaitu tersedianya pangan yang cukup yang sebagian besar berasal dari produksi sendiri, Stabilitas ketersediaan pangan sepanjang tahun tanpa pengaruh musim, akses atau keterjangkauan terhadap pangan yang dipengaruhi oleh akses fisik dan ekonomi terhadap pangan. Sedangkan menurut Suryana (2004), ada 3 dimensi yang saling terkait menyangkut ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi, ditunjang oleh pelaku kepentingan (produsen, pengolah, pemasar dan konsumen), serta dikelola oleh berbagai institusi (sektoral, subsektoral, skala usaha, pemerintah dan masyarakat) dan melibatkan interaksi timbal balik antar wilayah. Perkembangan Produksi dan Kemandirian Pangan Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan konsumsi, namun hal ini dinilai belum mencukupi dalam konteks ketahanan pangan, sebab masih banyak variable yang berpengaruh untuk mencapai ketahanan pangan tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Bila terjadi kelebihan (surplus), pangan tersebut dapat diperdagangkan antar wilayah terutama bagi wilayah yang mengalami defisit pangan dan ekspor. Sebaliknya bila terjadi defisit, sebagian pangan untuk konsumsi dalam negeri dapat dipenuhi dari pasar luar negeri atau impor (Ariani, 2007).

2.1.4.3. Indikator Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan rumah tangga dapat diukur menggunakan berbagai indikator. Indikator-indikator yang dapat digunakan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain sebagai berikut :

a. Indikator Jonsson dan Toole dalam penelitian Purwaningsih (2010), digunakan dalam mengukur ketahanan pangan di Greater area, area ukurannya adalah pengeluaran pangan dan konsumsi gizi rumah tangga, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Rumah tangga tahan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan rendah (< 60 persen pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi energi (> 80 persen dari syarat kecukupan energi).
- 2) Rumah tangga kurang pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan rendah (< 60 persen pengeluaran rumah tangga) dan kurang mengkonsumsi energi (≤ 80 persen dari syarat kecukupan energi).
- 3) Rumah tangga rentan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (≥ 60 persen pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi energi (> 80 persen dari syarat kecukupan energi).
- 4) Rumah tangga rawan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (≥ 60 persen pengeluaran rumah tangga) dan tingkat konsumsinya kurang (≤ 80 persen dari syarat kecukupan energi).

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Juanita (2006)

Dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 1999-2003”, memberikan kesimpulan bahwa investasi asing mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti jika jumlah investasi asing meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

2. Rajamuddin (2002)

Pada skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Kredit Usaha Kecil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan” mengemukakan bahwa hasil pengujian empiris yang dilakukan mendukung hipotesis yang dikemukakan, dimana terbukti dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing, dan kredit usaha kecil maka akan mengakibatkan pula kenaikan pada pertumbuhan ekonomi.

3. Moch. Daamar (2014)

Moch. Damar Jaya melakukan Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing (PMA), Dan Ekspor Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 1998-2012. Dalam penelitiannya Moch. Damar Jaya menggunakan model OLS menemukan bahwa utang luar negeri (ULN) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, penanaman modalasing (PMA) memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dan ekspor (EX) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Persamaan penelitian Moch. Damar Jaya dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel Utang Luar Negeri, dan Ekspor sebagai variabel independen dan PDB sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian Moch. Damar Jaya dengan penelitian ini adalah penggunaan model penelitian. Moch. Damar Jaya menggunakan hanya metode OLS dalam menganalisis data, sedangkan penelitian ini selain menggunakan metode OLS penelitian ini juga menggunakan metode ECM (Error Correction Model), Penggunaan kedua model tersebut bertujuan menganalisis dampak jangka pendek maupun jangka panjang variabel independen terhadap variabel dependen. Model OLS bertujuan menganalisis dampak jangka pendek, dan model ECM menganalisis dampak jangka panjang.

4. Nur Hidayah Setiono (2009)

Hasil penelitian Nur Hidayah Setiono (2009) yang berjudul “Pengaruh Hutang Luar Negeri Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999 -

2008” yang meneliti melalui peranan hutang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan pada sektor pemerintah di Indonesia selama periode pengamatan sudah tidak lagi memberikan kontribusi yang besar dalam pengeluaran pembangunan dimana dalam dua tahun belakangan kontribusi hutang luar negeri sebesar 6% pada tahun 2008 yang jauh lebih rendah dibandingkan tabungan pemerintah yang memberi kontribusi hingga 94% pada pengeluaran pemerintah. Utang luar negeri yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk membiayai pembangunan agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nampaknya sudah tidak efektif diakibatkan oleh hutang baru yang diambil pemerintah lebih banyak digunakan untuk membayar bunga dan cicilan pokok hutang lama. Sehingga hutang luar negeri berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang.

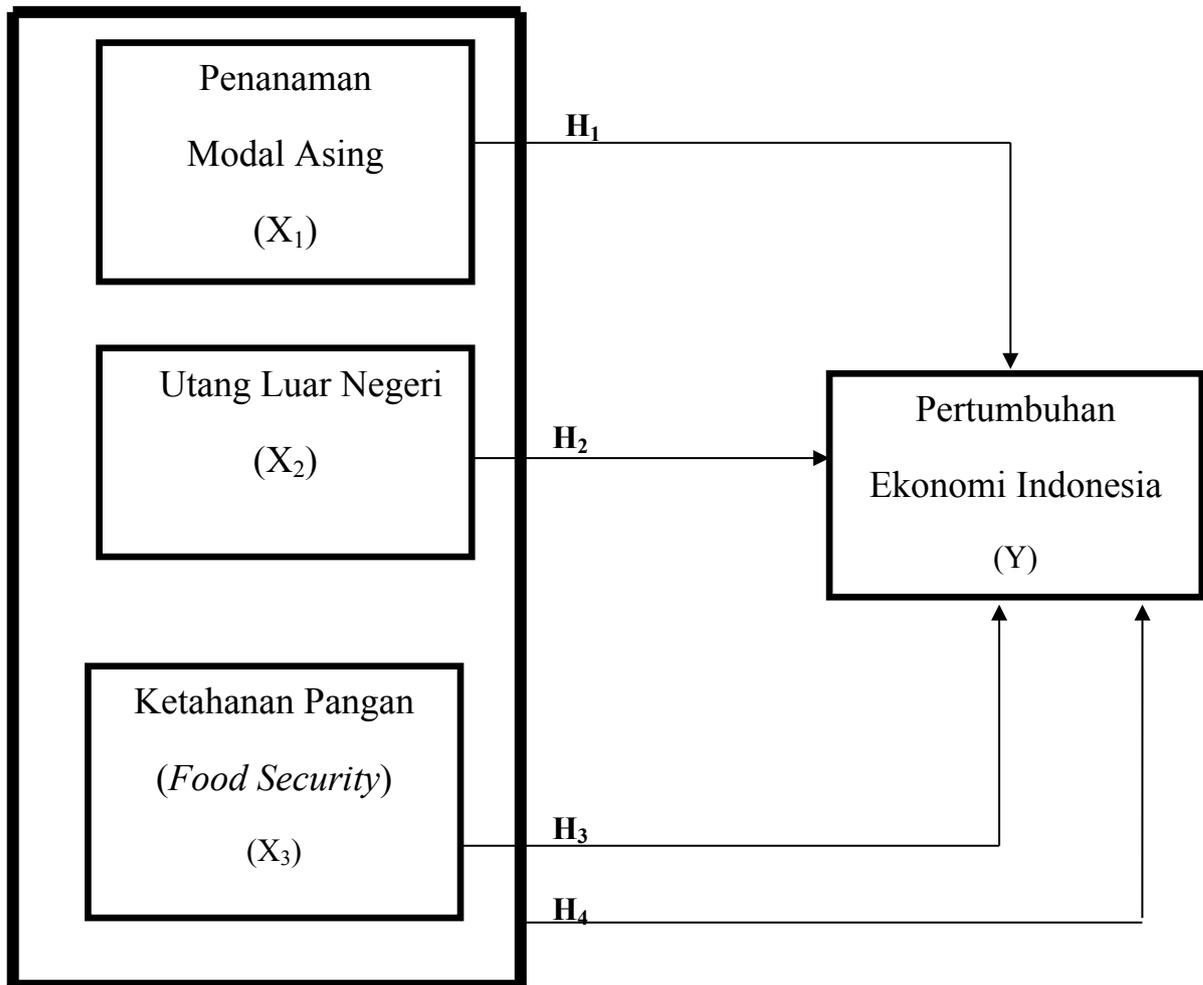
2.3. Model Konseptual Penelitian

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus berusaha untuk melakukan pembangunan di segala sektor. Namun dalam perkembangannya. Utang merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan karena berbagai macam alasan yang rasional. Selain untuk dapat membantu dalam hal perdagangan juga dapat meningkatkan kerja sama antar negara dalam berbagai sektor. Utang pemerintah terhadap luar negeri dapat merangsang perekonomian dalam negeri sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan di Indonesia (Sukirno, 2006).

Ketahanan pangan memiliki peran ganda yaitu sebagai salah satu sasaran utama pembangunan dan sebagai salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi. Peran pertama merupakan fungsi ketahanan pangan sebagai prasyarat

untuk terjaminnya akses pangan bagi semua penduduk negara dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk eksistensi hidup, sehat, dan produktif. Akses terhadap pangan yang cukup merupakan hak azasi manusia yang harus selalu dijamin oleh negara bersama masyarakat. Peran kedua, merupakan implikasi dari fungsi ketahanan pangan sebagai syarat keharusan dalam pembangunan sumberdaya manusia yang kreatif dan produktif yang merupakan determinan utama dari inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan tenaga kerja produktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan juga memiliki fungsi sebagai salah satu determinan lingkungan perekonomian yang stabil dan kondusif bagi pembangunan (Purwaningsih, 2008).

Dalam usaha untuk melanjutkan pembangunan nasional diperlukan upaya dari pihak terkait. Untuk itu diperlukan dana investasi yang cukup besar guna mempertahankan dan melanjutkan pembangunan yang telah dicapai, dan salah satu sumber dana pemerintah dalam melakukan investasi adalah tabungan pemerintah. Namun disadari bahwa tabungan pemerintah ini belum mencukupi untuk membiayai investasi yang dilakukan pemerintah. Sehingga akan sangat membantu jika investasi swasta khususnya pihak asing ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Hal ini akan mempermudah bagi perusahaan yang ditanamkan modalnya oleh asing dalam proses pendistribusian yang bertujuan untuk meminimalisir perbedaan harga yang dialami oleh beberapa wilayah di Indonesia. Apabila hal tersebut bisa teratasi maka tingkat konsumsi di masyarakat akan baik dan akan membantu dalam proses pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006).



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul Sugiyono (2012) berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah dan didukung oleh penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini ialah :

- 1.H₁: Diduga Penanaman Asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- 2.H₂: Diduga Utang Luar Negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3.H₃: Diduga *Food Security* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4.H₄: Diduga Penanaman Modal Asing, Utang Luar Negeri dan *Food Security* berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.